

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. DASAR FILOSOFIS PERENCANAAN DAERAH

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun, memerlukan suatu landasan filosofi pembangunan yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi *basic* bagi daerah untuk menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Sleman digali dari kekayaan nilai-nilai filosofis lokal, yaitu: “*Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Titi Tentrem Kerta Raharja*” dengan makna sebagai berikut:

- Gemah Ripah* : Perwujudan keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan lahir dan batin;
- Loh Jinawi* : Perwujudan keadaan lahan (tanah) beserta tanam-tanaman yang ada di atasnya sangat subur;
- Tata Titi Tentrem* : Suatu kondisi masyarakat yang taat pada aturan, disiplin, demokratis, bijak dalam bertindak, aman, tentram, dan damai;
- Kerta Raharja* : Tercapainya tingkat kemakmuran/ kesejahteraan di masyarakat yang berpedoman pada keselamatan lahir dan batin.
- Rangkuman : Perwujudan suatu kondisi masyarakat yang memiliki kemakmuran, kesejahteraan dengan penuh rasa kedamaian, keamanan, dan keteraturan.

Implementasi filosofis juga diwujudkan dalam slogan pembangunan desa terpadu di Kabupaten Sleman, yakni “**SLEMAN SEMBADA**”.

Secara harafiah **SEMBADA** dapat dipahami sebagai suatu sikap dan perilaku yang berwatak kesatria, bertanggungjawab, taat azaz, setia menepati janji,



pantang menyerah, tabu berkeluh kesah, bulat tekad, kukuh mempertahankan kebenaran menghindari dari perbuatan tercela, mampu menangkal dan mengatasi segala masalah, tantangan dan ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri, rela berkorban, dan mengabdikan bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Sebagai slogan untuk upaya pembangunan, **SEMBADA** merupakan singkatan yang dapat diuraikan atas arti huruf-huruf sebagai berikut:

S: Sehat

Yaitu kondisi masyarakat yang sehat jasmani, rohani, sosial, dan lingkungan.

E: Elok dan Edi

Elok adalah aspek keindahan yang alami yang hanya diciptakan oleh pencipta alam, misalnya pemandangan alam; sedangkan Edi adalah aspek keindahan sebagai hasil rekayasa manusia, misalnya pembuatan pertamanan.

M: Makmur dan Merata

Yaitu kondisi masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan lahir batin, merata di seluruh wilayah, lapisan dan golongan masyarakat

B: Bersih dan Berbudaya

Yaitu kondisi lingkungan yang terbebas dari segala bentuk pencemaran, kondisi masyarakat yang bersih lahir batin, bebas dari cerca cela, tak berprasangka buruk, menjauhi berbagai bentuk kecemburuan. Disamping itu juga berbudi luhur dan memiliki sikap budaya bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

A: Aman dan Adil

Yaitu kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan dan rongrongan yang mengancam keselamatan lahir dan batin, karena terjaminnya rasa keadilan dalam tatanan kehidupan.

D: Damai dan Dinamis

Yaitu kondisi masyarakat yang jauh dari pertikaian dan silang sengketa, mantap dalam menciptakan berbagai bentuk kerukunan, semua permasalahan diselesaikan dengan musyawarah, namun tetap menggalakkan dinamika masyarakat secara individu maupun kelompok untuk merangsang aktivitas yang kreatif dan inovatif dalam memperlancar laju pembangunan.



A: Agamis

Yaitu kondisi masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai agama sebagai landasan semua akal pikiran dan pertimbangan rasa dalam melaksanakan kehendak demi terciptanya kondisi masyarakat yang sehat, makmur yang merata, berbudaya, aman dan adil, damai dan dinamis, serta kondisi alam yang bersih, elok dan edi.

SEMBADA berfungsi sebagai wahana untuk mencapai kondisi **SLEMAN** yang Sejahtera, Lestari, dan Mandiri. Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi wilayah dan masyarakat yang terpenuhi lahiriah, batiniah, dunia dan akherat; Lestari dimaksudkan tumbuh kembang terus menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan, mampu mengikuti perubahan keadaan sesuai perkembangan; dan Mandiri dimaksudkan berdiri atas kemampuan sendiri, bebas dari sifat ketergantungan, tetapi tetap memiliki keterikatan dengan lingkungan.

B. VISI

Visi Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SLEMAN YANG LEBIH SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN TAHUN 2010”**.

Visi ini mengandung pengertian sebagai berikut :

Perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

Visi Kabupaten Sleman dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Sleman yang terdiri dari penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat, untuk mencapai cita-cita Kabupaten Sleman.

C. MISI

Untuk mewujudkan visi masyarakat Kabupaten Sleman, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik;
2. Menjaga keberlanjutan kegiatan perekonomian masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

D. PRINSIP-PRINSIP DAN NILAI-NILAI (CORE VALUES)

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai organisasi yang perlu dikembangkan untuk mencapai visi dan misi daerah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Prinsip-prinsip:

Demokrasi; Partisipasi; Transparansi; Akuntabilitas; dan Desentralisasi.

Nilai-nilai:

Keadilan; Profesional; Integritas; Tanggung Jawab; Kemandirian; Disiplin; Kerjasama; Kesenjangan; dan Kebersamaan dalam Keragaman.

E. TUJUAN

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan umum yang akan dicapai dalam 1 sampai dengan 5 tahun ke depan, sebagai berikut:

| Misi | Tujuan |
|--|--|
| a. Menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik: | <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah;2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat;4. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis. |



| | |
|--|---|
| b. Menjaga keberlanjutan kegiatan perekonomian masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi; 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat; 3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya buatan yang efektif. 4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari. |
| c. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas hidup penduduk; 2. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial. |

F. SASARAN

Sasaran kinerja merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja kegiatan yang menyangkut keseluruhan satuan kerja/ Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Sleman telah ditetapkan sejumlah 34 sasaran, dan untuk penyusunan LAKIP Kabupaten Sleman Tahun 2010 sasaran yang digunakan dalam pengukuran pencapaian sasaran ditetapkan 19 sasaran dengan 40 program utama yang ada.

Program Utama tahun 2010 yang akan direalisasikan adalah sebagai berikut :

- 1 Peningkatan pengelolaan SDM aparatur
- 2 Peningkatan kesejahteraan aparat
- 3 Peningkatan profesionalisme aparatur dan pejabat negara
- 4 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
- 5 Peningkatan kualitas pelayanan publik
- 6 Pengembangan kualitas kebijakan publik
- 7 Peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
- 8 Perencanaan pembangunan daerah



- 9 Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum
- 10 Pembentukan produk hukum dan HAM
- 11 Peningkatan keamanan dan ketertiban
- 12 Pengembangan wawasan kebangsaan
- 13 Pengembangan budaya demokratis
- 14 Peningkatan ketahanan pangan
- 15 Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan teknologi petani
- 16 Pengembangan agribisnis
- 17 Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM
- 18 Pengembangan usaha kecil dan UMKM
- 19 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
- 20 Peningkatan kemampuan rekayasa dan pemanfaatan teknologi dalam industri
- 21 Pengembangan obyek dan daya tarik wisata
- 22 Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
- 23 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- 24 Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas
- 25 Peningkatan manajemen lalu lintas
- 26 Peningkatan pemeliharaan prasanana dan sarana pengairan
- 27 Peningkatan pemeliharaan prasanana dan sarana perumahan dan permukiman
- 28 Peningkatan prasanana dan sarana fasilitas umum
- 29 Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 30 Kualitas pendidikan dasar dan menengah
- 31 Kualitas pendidikan non formal
- 32 Penelitian dan pengembangan pendidikan
- 33 Peningkatan manajemen pendidikan
- 34 Upaya kesehatan masyarakat
- 35 Standarisasi pelayanan kesehatan
- 36 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan



- 37 Peningkatan kualitas pelayanan KB dan manajemen kependudukan
- 38 Informasi kerja dan kualitas penempatan tenaga kerja
- 39 Peningkatan kualitas penanganan permasalahan sosial
- 40 Peningkatan pengelolaan nilai-nilai luhur budaya

Adapun Sasaran Kinerja tahun 2010 yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya SDM aparat
2. Meningkatnya efisiensi birokrasi
3. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat
4. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah
6. Menurunnya kasus pelanggaran hukum
7. Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat
9. Meningkatnya produksi barang dan jasa
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perhubungan
11. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengairan
12. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman
13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
14. Meningkatnya kualitas pendidikan
15. Meningkatnya derajat kesehatan
16. Meningkatnya keluarga sejahtera
17. Meningkatnya kesejahteraan pekerja
18. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS
19. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya



G. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Sleman tahun 2010 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD Tahun 2010, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2010.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2010 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5 Penetapan Kinerja Kabupaten Sleman Tahun 2010.

PENETAPAN KINERJA 2010

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | | | |
|----|---|---------------------------|--|-------------|--------|
| | | Uraian | | Satuan | Target |
| 1 | Meningkatnya SDM aparat | - | Tingkat penurunan pelanggaran disiplin pegawai | % | 5 |
| | | - | Aparat yang mendapat penghargaan | % | 20 |
| | | - | Tertib pelayanan administrasi kepegawaian | % | 90 |
| 2 | Meningkatnya efisiensi birokrasi | - | SOP yang telah dimiliki instansi | jenis | 56 |
| 3 | Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat | - | Indek kepuasan masyarakat | Angka indek | 80 |
| | | - | Penanganan pengaduan masyarakat | % | 80 |



| | | | | | |
|----|--|---|--|---|-------|
| 4 | Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah | - | Peningkatan PAD | % | 7 |
| | | - | Tertib pengelolaan keuangan daerah | % | 95 |
| | | - | Tertib administrasi pengelolaan kekayaan daerah | % | 70 |
| 5 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan publik | - | Keterlibatan publik dalam perencanaan publik | % | 90 |
| | | - | Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik | % | 90 |
| 6 | Menurunnya kasus pelanggaran hukum | - | Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda | % | 80 |
| 7 | Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat | - | Kejadian pekat | % | 5 |
| | | - | Pelayanan penanganan bencana | % | 85 |
| 8 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat | - | Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih | % | 80 |
| 9 | Meningkatnya produksi barang dan jasa | - | Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian | % | 3,80 |
| | | - | Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor industri | % | 1,90 |
| | | - | Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran | % | 5 |
| | | - | Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor jasa-jasa | % | 3,10 |
| 10 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perhubungan | - | Prasarana perhubungan dengan kondisi baik | % | 62,25 |
| | | - | Sarana perhubungan dengan kondisi baik | % | 62,94 |



| | | | | | |
|----|---|---|---|-----------------------------|-------|
| | | - | Penambahan prasarana dan sarana perhubungan | % | 3,18 |
| 11 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengairan | - | Prasarana dan sarana pengelolaan sumberdaya air dengan kondisi baik | % | 70,00 |
| 12 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman | - | Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman dengan kondisi baik | % | 68,44 |
| | | - | Penambahan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman | % | 0,36 |
| 13 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | - | Kualitas air badan air memenuhi baku mutu | % | 58 |
| | | - | Penanganan kasus lingkungan hidup | % | 100 |
| | | - | Rasio sampah terkelola | % | 96,50 |
| 14 | Meningkatnya kualitas pendidikan | - | Angka melek huruf | % | 94,63 |
| | | - | Rata-rata lama sekolah | tahun | 10,2 |
| | | - | Kualifikasi tenaga pendidikan | % | 79,79 |
| 15 | Meningkatnya derajat kesehatan | - | Usia harapan hidup | Tahun | 74,9 |
| | | - | Angka kematian bayi | Per 1000 kelahiran hidup | 7,63 |
| | | - | Angka kematian ibu melahirkan | per 100.000 kelahiran hidup | 69,27 |
| | | - | Balita dengan gizi buruk | % | 0,45 |
| 16 | Meningkatnya keluarga sejahtera | - | Laju pertumbuhan penduduk | % | 1,11 |
| | | - | Jumlah kelahiran | per 1000 penduduk | 1,7 |
| | | - | Tingkat kesejahteraan keluarga KS | % | 74,90 |
| 17 | Meningkatnya kesejahteraan pekerja | - | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja | % | 4,98 |
| | | - | Penyerapan lulusan pasca pelatihan kerja | % | 60 |



| | | | | | |
|----|---|---|---|----------|-------|
| | | - | Penempatan tenaga kerja terdaftar | % | 23 |
| 18 | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS | - | Proporsi KK miskin terhadap jumlah KK | % | 25,10 |
| | | - | Proporsi PMKS terhadap banyaknya penduduk | % | 5,40 |
| 19 | Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya | - | Pelestarian situs sejarah | Lokasi | 70 |
| | | - | Pengembangan keragaman seni | Kelompok | 892 |
| | | - | Pelestarian nilai-nilai adat | jenis | 13 |

Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

H. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kabupaten Sleman mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:



1. Meningkatnya SDM aparatt

Kebijakan:

Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang pemerintahan umum dengan program:

- a. Peningkatan pengelolaan SDM aparatur
- b. Peningkatan kesejahteraan aparatur
- c. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pejabat negara

2. Meningkatnya efisiensi birokrasi

Kebijakan:

Meningkatkan efektifitas birokrasi

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang pemerintahan umum dengan program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

3. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat.

Kebijakan:

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang pemerintahan umum dengan Program:

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- b. Pengembangan kualitas kebijakan publik

4. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Kebijakan:

Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang pemerintahan umum dengan program peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.



5. Meningkatnya paritipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah

Kebijakan :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
- b. Meningkatkan kualitas dan manajemen data dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang perencanaan daerah dengan program Perencanaan pembangunan daerah.

6. Menurunnya kasus gangguan hukum.

Kebijakan:

Mengembangkan budaya hukum, kesadaran dan ketaatan hukum serta mendorong terlaksananya penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang kesatuan bangsa & politik dalam negeri dengan program:

- a. Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum.
- b. Pembentukan produk hukum dan HAM.

7. Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

Kebijakan:

Mewujudkan stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, hambatan dan gangguan dengan didukung oleh kesadaran swakarsa masyarakat dalam menjaga ketentuan dan ketertiban.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang kesatuan bangsa & politik dalam negeri dengan program Peningkatan keamanan, dan ketertiban.



8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.

Kebijakan:

Meningkatnya etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang bidang kesatuan bangsa & politik dalam negeri dengan program:

- a. Pengembangan wawasan kebangsaan.
- b. Pengembangan budaya demokratis.

9. Meningkatnya produksi barang dan jasa.

Kebijakan:

- a. Meningkatkan ketahanan pangan melalui swasembada beras serta pengembangan pangan alternatif.
- b. Mengoptimalkan sistem dan distribusi sarana produksi pertanian.
- c. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani pangan, ikan dan ternak, serta kelompok tani hutan dan kebun.
- d. Meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian.
- e. Meningkatkan peran Kebun Bibit Desa dan Balai Benih Ikan
- f. Meningkatkan kemampuan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota.
- g. Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, kemampuan akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran.
- h. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.
- i. Meningkatkan perlindungan konsumen, Mengembangkan manajemen usaha perdagangan dan pengendalian distribusi.
- j. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan ipek dalam usaha perekonomian terutama UMKM.
- k. Meningkatkan industri mikro dan kecil melalui penguatan modal dan perluasan jaringan pemasaran,

- l. Meningkatkan daya tarik dan daya saing obyek wisata.
- m. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Ketahanan Pangan, bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bidang Perdagangan, bidang Industri, bidang Pariwisata, Perdagangan dengan program :

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- b. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Teknologi Petani.
- c. Program Pengembangan Agribisnis.
- d. Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi UMKM..
- e. Program Pengembangan Usaha Kecil dan UMKM.
- f. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM.
- g. Program Peningkatan Kemampuan Rekayasa dan Pemanfaatan Teknologi dalam Industri.
- h. Program Pengembangan obyek dan daya tarik wisata.

10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perhubungan

Kebijakan:

Memelihara, meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pemerataan prasarana dan sarana perhubungan untuk mewujudkan tertib berlalu lintas dan mengurangi kecelakaan.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang perhubungan dengan program :

- a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- b. Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas.
- c. Peningkatan manajemen lalulintas.

11. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pengairan

Kebijakan:

Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sumberdaya air melalui peran serta masyarakat untuk menjaga bendungan, saluran dan prasarana irigasi berfungsi baik.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang pekerjaan umum dengan program: Peningkatan pemeliharaan prasanana dan sarana pengairan

12. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman.

Kebijakan :

- a. Memelihara, meningkatkan kualitas dan pemerataan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman,
- b. Peningkatan kualitas perumahan yang sesuai dengan kelayakan kesehatan dan teknis bangunan.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang perumahan dengan program:

- a. Peningkatan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman.
- b. Peningkatan prasanana dan sarana fasilitas umum

13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Kebijakan :

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat,
- b. Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang lingkungan hidup dengan program utama : Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

14. Meningkatnya kualitas pendidikan.

Kebijakan:

- a. Mempertahankan Wajar 9 tahun dan mendorong kemandirian masyarakat dalam mencapai pendidikan lebih lanjut.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan.
- c. Mengembangkan kurikulum yang berwawasan mutu.
- d. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan.
- e. Mewujudkan iklim belajar yang lebih kompetitif berdasarkan pada potensi akademis.



- f. Mewujudkan lembaga pendidikan, organisasi pemuda dan olahraga, serta partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam rangka pembangunan bidang pendidikan.
- g. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pemerataan, pengembangan kurikulum, penataan sistem pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat.
- h. Meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang pendidikan, dengan program utama :

- a. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b. Program Kualitas pendidikan non formal
- c. Program Penelitian dan pengembangan pendidikan
- d. program Peningkatan manajemen pendidikan

15. Meningkatkan derajat kesehatan.

Kebijakan:

- a. Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
- b. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Sleman;
- c. Optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan puskesmas melalui pemberdayaan kader kesehatan dan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang kesehatan dengan program-program sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Standarisasi pelayanan kesehatan;
- c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan;



16. Meningkatnya keluarga sejahtera

Kebijakan:

- a. Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui peningkatan jejaring pelayanan KB dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas,
- b. Meningkatkan pembinaan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan program utama: Peningkatan kualitas pelayanan KB dan manajemen kependudukan

17. Meningkatnya kesejahteraan pekerja.

Kebijakan:

- a. Meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja.
- b. Meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/kesempatan kerja.
- c. Meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga kerja.
- d. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang kesehatan dengan program utama : Informasi kerja dan kualitas penempatan tenaga kerja.

18. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS.

Kebijakan:

- a. Pemberdayaan dan fasilitasi keluarga miskin.
- b. Meningkatkan pembinaan kehidupan beragama.
- c. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menurunkan penyalahgunaan napza.



Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang sosial dengan program utama : Peningkatan kualitas penanganan permasalahan sosial

19. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya

Kebijakan:

- a. Mengembangkan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai luhur melalui peran aktif masyarakat dan swasta,
- b. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang kebudayaan dengan program utama : Peningkatan pengelolaan nilai-nilai luhur budaya.